

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian ini membahas tentang Intervensi Komunitas Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Dalam Program Desaku Menanti di Kota Malang, Dari beberapa penelitian terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, Adapun penelitian-penelitian tersebut yang sama dengan tema Intervensi Komunitas sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Asep Sukandi (Mahasiswa Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial) yang dilakukan pada tahun 2016. Dengan judul penelitian Intervensi Komunitas Bocah Sisih Kidul (BOSSKID) dalam pembentukan Pola Perilaku Sosial anak dengan rumusan masalah penelitian terkait Intervensi Komunitas Bosskid dalam pembentukan atau perubahan pola perilaku sosial anak. Penelitian yang dilakukan saudara Asep Sukandi fokus pada proses intervensi yang mengarah pada pembentukan pola perilaku anak sedangkan fokus peneliti yaitu untuk mengetahui Intervensi Komunitas pada eks gelandangan pengemis dan anak jalanan melalui program desaku menanti serta untuk mengetahui hasil intervensi komunitas yang sudah dilakukan di dalam desaku menanti.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rohmaniyati
Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rohmaniyati (Mahasiswa Negeri

Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah) yang dilakukan pada tahun 2016. Dengan judul penelitian Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu yang bertujuan untuk menuntaskan adanya gelandangan pengemis supaya tidak kembali ke jalanan namun perbedaanya Rina lebih fokus pada Hasil kegiatan program UEP adalah hasil penjualan di warung, perikanan berupa ikan lele, dan pertanian berupa buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat yang diperjual belikan dan dikonsumsi, warga binaan Gepeng mendapatkan bagi hasil dalam kegiatan ini. Faktor pendukung pelaksanaan program UEP yaitu: ketersediaan lahan yang subur, ketersediaan sarana prasarana, memiliki sumber daya manusia, memiliki jaringan kerjasama yang luas dalam bidang pelatihan hingga pengelolaan. Faktor penghambatnya yaitu: kondisi alam, kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, kondisi psikologis Gepeng, dan kurangnya pendidikan Gepeng. Dampak pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif bagi lembaga yaitu mampu menggerakkan organisasi dan mencukupi kebutuhan pokok seluruh warga binaan. Bagi warga binaan Gepeng adalah memiliki kemampuan, keterampilan, dapat menabung dan tidak kembali ke jalanan.

Ketiga, Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Devilia Sukma Eka Santi Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2017 dengan judul Skripsi Implementasi Program Desaku Menanti Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan

Pengemis (Gepeng) studi di kampung Kesetiakawanan Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kec. Kedung Kandang Kota Malang dengan rumusan masalah implementasi program dalam proses rehabilitasi sosial gepeng serta faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program desaku menanti dalam rehabilitasi gepeng di kota malang. Penelitian yang dilakukan oleh devilia memiliki persamaan dengan peneliti terkait program desaku menanti dan gepeng namun bedanya devilia lebih fokus terhadap rehabilitasi sosial gepeng sedangkan peneliti lebih fokus pada intervensi komunitas gepeng dalam program desaku menanti.

B. Konsep Pendekatan Intervensi Komunitas (*Community Intervention Approach*)

1. Pengertian Intervensi

Intervensi merupakan upaya untuk membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan peranan sosialnya dengan baik.¹² Metode intervensi dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, masyarakat) untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui mengembalikan keberfungsian sosialnya supaya dapat menjalani kehidupannya secara mandiri. Seperti masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat namun tidak melewati batasan-batasan norma yang ada. Dalam melakukan

¹² Alamsyah, 2015. Cepi Yusran, *Praktik Pekerja Sosial Generalis Suatu Tuntutan Intervensi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar hlm. 173

intervensi sebagai seorang agen perubahan harus memiliki tiga buah bekal yaitu :

- a. Knowledge (pengetahuan) seorang agen perubahan dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang baik terkait konsep-konsep dibidang kesejahteraan sosial.
- b. Skill (keterampilan) yang mana seorang agen perubahan harus mampu menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki kedalam praktek di masyarakat
- c. Value (nilai) nilai-nilai yang di usung oleh praktisi kesejahteraan sosial sendiri adalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang mengarah pada kebaikan.

Maka didalam intervensi tersebut terdapat tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut diantaranya tahapan persiapan, Tahap Assessment, Tahap Perencanaan alternative program, Tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan atau implementasi program, Tahap evaluasi, Tahap Terminasi.

2. Pengertian Komunitas

Secara umum komunitas dapat diartikan sebagai kumpulan individu (bisa juga dalam bentuk kelompok) yang masih memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil (lokalitas) dengan batas-batas yang jelas.¹³ Sedangkan pengertian komunitas dapat dipahami secara deskriptif dan normatif. Secara deskriptif pengertian komunitas merujuk kepada

¹³Nasdian, F.T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h.62

sekelompok orang yang di dalamnya terdiri dari individu-individu yang memiliki perasaan sebagai bagian dari jaringan komunitas tersebut, dilandasi dengan ikatan solidaritas, kepercayaan dan keamanan bersama.¹⁴ Secara normatif, komunitas dapat menunjukkan adanya kepentingan untuk berbagi dan bekerja sama di dalam segala aspek kehidupan manusia. Peran normatif ini berlangsung secara terus menerus karena pada ruang ini tatanan normatif dalam komunitas dapat berkembang menjadi sebuah ideologi bersama. Ideologi bersama dalam komunitas dapat digunakan untuk menyamakan adanya konflik kepentingan. Dalam kaitannya dengan luas lingkup intervensi komunitas, melihat setidaknya komunitas mempunyai tiga tingkatan yang berbeda dimana sebuah intervensi komunitas dapat dilakukan, yaitu:¹⁵

- a. *grassroot* ataupun *neighbourhoodwork* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya di dalam suatu Kelurahan ataupun Rukun Tetangga)
- b. *local agency* dan *inter-agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi di tingkat local, provinsi ataupun di tingkat yang lebih luas, bersama jajaran pemerintahan yang terkait serta organisasi non pemerintahan yang berminat terhadap hal tersebut)
- c. *regional* dan *national community planning work* (misalnya pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan

¹⁴Kenny, S. (2007). *Developing communities for the future*. 3rd edition. Melbourne: Thomson. h.47

¹⁵Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali, h.82-83

pembangunan ekonomi, ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih luas dari bahasan di tingkat lokal)

Terkait dengan pembahasan mengenai pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dikenal sebagai metode intervensi sosial di level komunitas yang dapat disebut sebagai intervensi komunitas.¹⁶

Menurut Rothman yang dikutip oleh Isbandi, bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komunitas ini dapat dilakukan melalui model intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan (kebijakan) sosial, dan aksi sosial. Intervensi komunitas memainkan peranan penting dalam pengembangan sosial dan pemberdayaan sosial serta pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat. Maka, intervensi komunitas dapat didefinisikan sebagai perubahan terencana yang mencakup tiga bentuk intervensi yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan (kebijakan) sosial, dan aksi sosial.¹⁷

3. Pengertian Intervensi Komunitas

Terkait dengan pembahasan mengenai pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat. Fokus pada bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial dikenal sebagai intervensi sosial namun di level komunitas dapat disebut sebagai intervensi komunitas.¹⁸

¹⁶Ibid., Hal.115

¹⁷Ibid., Hal. 120

¹⁸ Ibid., Hal 116

Menurut Davies yang dikutip oleh Soetomo, menyatakan bahwa komponen yang ada dalam komunitas adalah lokalitas, hubungan emosional, keterlibatan sosial, kohensi sosial dan kepentingan bersama.¹⁹ Hal tersebut dapat menjadi dorongan atau dukungan serta sebagai modal komunitas dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Adapun menurut Rothman yang dikutip oleh Isbandi, bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komunitas ini dapat dilakukan melalui model intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan (kebijakan) sosial, dan aksi sosial. Intervensi Komunitas memiliki peran penting dalam pengembangan sosial dan pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat. Jadi, Intervensi Komunitas dapat di artikan sebagai perubahan terencana yang mencakup dari tiga bentuk intervensi komunitas tersebut.

4. Model Intervensi Komunitas

Salah satu model intervensi komunitas adalah pengembangan masyarakat lokal (community action). Pengembangan masyarakat lokal lebih memberi penekanan pada *process goal* (tujuan yang berorientasi pada proses), dimana suatu komunitas mengembangkan kemampuan atau kapasitasnya di dalam pembangunan masyarakat. Proses pengelolaan sumber daya masyarakat berbasis komunitas, merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberikan peran dominan kepada masyarakat ditingkat komunitas, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya yang produktif. Melalui strategi tersebut,

¹⁹ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm 82

komunitas dapat mengembangkan sumber daya yang ada, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya yang dimaksud, dapat berupa energy atau tenaga masyarakat, kreatifitas (skill), teknologi, informasi dan hal yang dapat mendukung lainnya seperti tanah,air,pohon, lingkungan yang dapat dimanfaatkan sumber potensinya untuk dapat dikembangkan. Maka dalam pembahasan mengenai Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dikenal dengan metode intervensi sosial dilevel komunitas yang disebut dengan intervensi komunitas. Menurut Rothman (1995) bahwa proses pemberdayaan dapat di gambarkan melalui intervensi komunitas dan ini dapat dilakukan melalui beberapa model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat kecil, perencanaan dan kebijakan sosial serta aksi sosial. Dalam membedakan ketiga model intervensi sosial di level komunitas dapat menggunakan 12 kriteria yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :²⁰

Tabel 2.1
Tiga Model Intervensi dalam Intervensi Komunitas

	Model A (Pembangunan Masyarakat Lokal)	Model B (Kebijakan Sosial / Perencanaan Sosial)	Model C (Aksi Sosial)
1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat	Kemandirian; pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat (tujuan dititik beratkan pada	Pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah yang penting yang ada pada masyarakat (tujuan di	Pergeseran (pengalihan) sumber daya dan relasi kekuasaan; perubahan institusi dasar (task

²⁰Ibid., Hal. 122-124

	proses = <i>process goals</i>)	titik beratkan pada tugas = <i>task-goals</i>)	ataupun process goals)
2. Asuransi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahan nya	Adanya anomie dan ‘kemurungan’ dalam masyarakat; kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan masalah secara demokratis; komunitas berbentuk tradisional statis.	Masalah sosial yang bersungguh-nya; kesehatan fisik dan mental, perumahan dan rekreasional.	Populasi yang dirugikan; kesenjangan sosial, perampasan hak, dan ketidakadilan.
3. Strategi perubahan dasar	Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri.	Pengumpulan data yang terkait dengan masalah, dan memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional.	Kristalisasi dari isu dan pengorganisasian massa untuk menghadapi sasaran yang menjadi ‘musuh’ mereka.
4. Karakteristik taktik dan tehnik perubahan	Konsensus; komunikasi antara kelompok ke pentingan dalam masyarakat (komunitas); diskusi kelompok	Konsensus atau konflik	Konflik atau kontes; konfrontasi; aksi yang bersifat langsung, negosiasi.
5. Peran praktisi yang menonjol	Sebagai enabler-katalis, koordinator; orang yang mengajarkan ketrampilan memecahkan masalah dan nilai- nilai etis.	Pengumpulan dan penganalisis data pengimplementasi program, dan fasilitator	Aktivis, Advokat, agitator, pialang, negosiator, partisan.
6. Media Perubahan	Manipulasi kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya satu tugas(small task oriented groups)	Manipulasi organisasi formal dan data yang tersedia	Manipulasi organisasi massa dan proses-proses politik

7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai kolaborator dalam suatu 'ventura' yang bersifat umum.	Struktur kekuasaan sebagai pemilik dan sponsor (pendukung)	Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan; mereka yang memberikan tekanan harus dilawan dengan memberikan tekanan balik
8. Batasan definisi penerima layanan (beneficiaris)	Keseluruhan komunitas geografis	Keseluruhan komunitas atau dapat pula suatu segmen dalam komunitas (termasuk komunitas fungsional)	Segmen dalam komunitas
9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas	Kepentingan umum atau permufakatan dari berbagai perbedaan	Permufakatan kepentingan atau konflik	Konflik kepentingan yang sulit dicapai kata mufakat; kelangkaan sumber daya
10. Konsepsi mengenai penerima layanan (beneficiaris)	Warga masyarakat.	Konsumen (pengguna jasa)	'korban'.
11. Konsepsi mengenai peran penerima layanan (beneficiaris)	Partisipan pada proses interaksional pemecahan masalah.	Konsumen atau resipien (penerima pelayanan)	Employer , konstituen , anggota

12. Pemanfaatan pemberdayaan (pemberdayaan digunakan untuk)	Mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama ; serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat.	Mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan ; serta memberi tahu para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada	Meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang ‘tertindas’ agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat guna melakukan aksi ; serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka
--	--	---	---

Sumber : Isbandi Rukminto Adi, 2008

Berikut ini penjelasan dari tabel 2.1 mengenai perbedaan dari model A, B dan C yang dilihat dari 12 kriteria, yaitu sebagai berikut: ²¹

1. Kategori Tujuan Tindakan Terhadap Masyarakat

Dilihat dari tabel terdapat dua tujuan utama yang di kategori pada sebuah process goal (tujuan yang berorientasi pada proses), dimana masyarakat dicoba untuk diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya (*community integration* dan *community capacity*) dalam upaya memecahkan masalah mereka secara kooperatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Sementara itu tujuan yang berorientasi pada tugas Model B (Perencanaan Sosial) kategori yang tujuannya lebih ditekankan pada task goal (tujuan yang berorientasi pada penyelesaian tugas) yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah sosial yang kongkrit (*Concere social problems*)

²¹Adi, Isbandi Rukminto, Loc.Cit

misalnya, Departemen Kesehatan, Perencanaan Kota dan Penyedia sistem layanan. Sedangkan untuk tujuan yang berorientasi pada proses perluasan dan pemeliharaan sistem dalam Model C ini mengarah pada kedua tujuan tersebut. Dengan tujuan untuk memapankan relasi kerja sama antar kelompok dalam suatu komunitas dan menstimulasikan masyarakat agar mempunyai minat dan partisipasi yang luas terhadap isu-isu sosial komunitas serta meningkatkan peran kepemimpinan dalam komunitas tersebut.

2. Asumsi Mengenai Struktur Komunitas Dan Kondisi Permasalahannya

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : komunitas lokal seringkali tertutupi oleh masyarakat yang lebih luas dan memunculkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan dalam komunitas lokal dapat terjadi pada relasi antarpribadi yang bermakna dan ketrampilan memecahkan masalah serta pemahaman mengenai proses demokrasi. Dalam hal ini dapat memunculkan keterasingan.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : seorang perencana sosial lebih melihat komunitas sebagai sejumlah kondisi masalah sosial inti yang bersifat khusus dengan minat dan kepentingan tertentu seperti masalah perumahan, pengangguran ataupun kesehatan.

Pada Model C (Aksi Sosial) : seorang praktisi aksi sosial mempunyai cara berpikir yang berbeda, mereka lebih melihat komunitas sebagai hirarki dari *previllage* dan kekuasaan. Target para praktisi Aksi Sosial adalah mereka yang mendapat tekanan, diabaikan ,tidak mendapat keadilan, dieksploitasi oleh pihak tertentu, dan sebagainya.

3. Strategi Perubahan Dasar dalam Melakukan Perubahan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : Melalui strategi perubahannya dicirikan dengan ungkapan “*marilah kita bersama-sama membahas masalah ini*”. Dari ungkapan tersebut terlihat adanya upaya mengembangkan keterlibatan warga sebanyak mungkin dalam dalam menentukan kebutuhan dan memecahkan masalah mereka.

Pada Model B (Perencanaan Sosial): Melalui startegi dasar yang dicirikan dengan ungkapan “*marilah kita kumpulkan fakta dan lakukan langkah-langkah logis berikutnya*”. Maka eorang perencana biasanya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi sebelum mereka memilih tindakan yang rasional dan tepat untuk dilakukan. Partisipasi dalam model B tidak sekental pada pengembangan masyarakat model A. Dalam perencanaan dan pengumpulan serta penganalisisan data (fakta) dengan menggunakan tenaga di luar komunitas tersebut. Maka dalam upaya mengembangkan program kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan fakta dari masyarakat tersebut.

Pada Model C (Aksi Sosial) : Melalui strategi perubahan dari model C terlihat dari ungkapan “*mari kita mengorganisir diri agar dapat melawan para penekan kita*”. Ungkapan tersebut merupakan kristalisasi isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat yang kemudian membuat masyarakat mengenali ‘musuhnya’ dan mengorganisasi diri dengan memberikan tekanan terhadap kelompok sasaran.

4. Karakteristik Taktik Dan Teknik Perubahan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat) : Taktik dalam pengembangan lebih ditekankan pada pencapaian konsensus. Hal ini biasanya dilakukan melalui komunikasi dan proses diskusi yang melibatkan berbagai macam individu maupun kelompok yang menekankan pada penerapan pengembangan masyarakat lokal.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : Taktik dan teknik yang sangat berperan adalah teknik pengumpulan data dan keterampilan untuk menganalisis, dalam taktik konsensus maupun konflik dapat diterapkan, namun tergantung pada hasil analisis perencanaan terhadap situasi yang ada.

Pada Model C (Aksi Sosial) : Para praktisi aksi sosial lebih menekankan pada taktik konflik dengan cara melakukan konfrontasi dan aksi-aksi langsung. Dengan kemampuan memobilisasi untuk melaksanakan demonstrasi.

5. Dan 6. Peran praktisi dan Media Perubahan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : Peranan yang dilakukan oleh *community worker* ataupun para praktisi lebih banyak mengacu pada peran sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Media perubahannya adalah melalui penciptaan kreasi dan manipulasi (positif) kelompok kecil yang berorientasi pada tugas. Dalam hal ini

membutuhkan bimbingan kelompok kearah penemuan dan pemecahan masalah secara kolaboratif.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : Peranan yang biasa digunakan oleh perencanaan sosial adalah peranan sebagai *expert* (pakar) yang lebih menekankan pada penemuan fakta, implementasi program, dan relasi dengan birokrasi, serta tenaga professional dari berbagai disiplin. Maka media perubahannya adalah manipulasi organisasi seperti juga dengan pengumpulan data dan analisis data.

Pada Model C (Aksi Sosial): Peranan yang dilakukan oleh community worker lebih mengarah pada peran sebagai advokat dan aktivis. Media perubahannya adalah dengan menciptakan dan memanipulasi pengorganisasian dan pergerakan massa untuk mempengaruhi politis. Oleh karena itu, pengorganisasian massa pada aksi sosial menjadi isu yang penting.

7. Orientasi Terhadap Struktur Kekuasaan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : Dalam struktur kekuasaan sudah tercakup di dalam konsepsi mengenai komunitas itu sendiri. Setiap segmen komunitas dianggap sebagai bagian dari sistem klien. Anggota-anggota dari struktur kekuasaan ditempatkan pada posisi sebagai kolaborator dari ventura yang bersifat umum. Oleh karena itu dapat memunculkan kesepakatan yang saling menguntungkan yang dapat diterima dan relevan sedangkan tujuan yang terlalu mencerminkan minat dan kepentingan segmen tertentu sering kali tidak dapat diterima.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : struktur kekuasaan biasanya muncul sebagai sponsor atau ‘boss’ dari praktisi (perencana). Oleh karena itu Morris dan Binstock menyatakan bahwa sangatlah sulit bagi seseorang untuk membedakan antara para perencana dengan organisasi yang mempekerjakannya. Para perencana merupakan tenaga professional yang terlatih dengan baik, dalam memberikan layanan dibutuhkan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak serta bantuan dana dan fasilitas dari orang yang memiliki kekuasaan.

Pada Model C (Aksi Sosial): struktur kekuasaan dianggap sebagai target eksternal dari suatu tindakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur kekuasaan berada diluar sistem klien. struktur kekuasaan seringkali dianggap sebagai kekuatan antitesis yang akan menekan klien (kelompok konstituen).

8. Batasan Definisi Penerima Layanan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : total komunitas biasanya didasarkan pada kesatuan geografis seperti Rukun Warga, Desa, Kota. Mereka dalam kesatuan tersebutlah yang menjadi klien dari *community worker*.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : klien dari perencanaan sosial bisa merupakan kesatuan geografis missal desa dan kota, tetapi dapat pula merupakan kesatuan fungsionalnya (misalnya kelompok tunagrahita, kelompok profesi dokter, kelompok pecinta buku, dan sebagainya)

Pada Model C (Aksi Sosial): klien dari praktisi aksi sosial biasanya merupakan segmen masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka

dapat dikatakan sebagai kelompok yang membutuhkan layanan tetapi tidak terjangkau oleh layanan tersebut; ataupun di tolak untuk mendapatkan layanan tersebut.

9. Asumsi Mengenai Kepentingan Kelompok-Kelompok Dalam Suatu Komunitas

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal): berbagai kepentingan kelompok dan faksi dalam masyarakat dilihat secara mendasar merupakan permufakatan yang responsif terhadap pengaruh dari persuasi yang rasional, komunikasi dan niat baik bersama.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Pendekatan yang dilakukan lebih pragmatis dan berorientasi untuk menangani masalah tertentu. Sehingga permufakatan ataupun konflik dapat ditolerir dalam pendekatan ini selama tidak menghalangi proses pencapaian tujuan.

Pada Model C (Aksi Sosial) : ada asumsi bahwa kepentingan dari masing-masing bagian dalam masyarakat sangat bervariasi dan sulit diambil kata mufakat sehingga seringkali cara-cara koersif harus dilaksanakan seperti melalui pemboikotan sebelum penyesuaian dapat terjadi. Oleh karena itu dorongan-dorongan dari kepentingan pribadi adalah yang menyebabkan mereka merasa bodoh kalau mereka melepaskan apa yang sudah mereka miliki.

10. Konsepsi Mengenai Penerima Layanan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : klien dipandang sebagai warga yang sederajat yang memiliki kekuatan yang perlu diperhatikan tetapi belum semuanya dapat dikembangkan secara optimal dengan memfokuskan pada kemampuan klien. Dari pandangan ini terlihat bahwa setiap warga adalah sumber daya yang berharga.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : klien dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Pada Model C (Aksi Sosial): Dalam aksi sosial klien atau konstituen lebih dilihat sebagai korban dari suatu sistem.

11. Konsepsi Mengenai Peran Penerima Layanan

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal) : Peran klien dalam mengembangkan masyarakat lokal dikonsepsikan sebagai partisipan aktif dalam proses interaksional satu dengan yang lainnya dan *community worker* nya. Dalam hal ini kelompok masyarakat bersama berusaha belajar dan mengembangkan diri.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : Klien memainkan peranan sebagai penerima pelayanan. Klien aktif mengkonsumsi (menggunakan) layanan-layanan yang diberikan tetapi bukan dalam proses menentukan tujuan dan kebijakan. Maka fungsi pembuatan kebijakan dijalankan setelah melakukan konsensus dengan elite.

Pada Model C (Aksi Sosial) : klien biasanya merupakan bawahan bersama dengan praktisi aksi sosial dan mereka berusaha mendobrak sistem yang ada dengan memainkan peranan sebagai bawahan dan pelayanan masyarakat.

12. Pemanfaatan Pemberdayaan (Pemberdayaan Digunakan Untuk)

Pada Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal): pemberdayaan digunakan untuk mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat.

Pada Model B (Perencanaan Sosial) : pemberdayaan digunakan untuk mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan, serta memberi tahu para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada.

Pada Model C (Aksi Sosial) : pemberdayaan digunakan untuk meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang 'tertindas' agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat guna melakukan aksi, serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka.

5. Pendekatan Intervensi Komunitas

Menurut Glen yang dikutip oleh Isbandi, pengembangunan masyarakat merupakan model intervensi terkait dengan praktik komunitas (*community practice*). Pendekatan ini pada dasarnya sangat kental dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang dalam komunitas, yang dimana hakikat dari kesejahteraan (*nature of welfare*) pada hal ini dilihat dari adanya perkembangan partisipasi

masyarakat.²² (partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam pengembangan masyarakat lokal merupakan wujud dari kesejahteraan sosial terkait dengan *community practice*. Sehingga partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mencapai keberfungsian merkea.

6. Tahapan Intervensi Komunitas

Tahapan intervensi adalah sebuah proses perubahan terencana dalam praktik generalis. Perubahan dan pembaruan dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar komunitas (eksternal). Sumber perubahan yang dimaksud, mulai dari asal mula tumbuhnya niat untuk berubah sampai asal-usul tampilnya berbagai ide baru, dalam mewujudkan perubahan dan pembaharuan.²³ Sedangkan menurut Isbandi secara umum intervensi komunitas dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :²⁴

1. *Tahapan persiapan (preparation)*. Sebelum memasuki suatu kelompok ataupun komunitas tertentu seorang *community worker* biasanya melakukan seperangkat persiapan. Pada tahap persiapan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan.
 - a) Persiapan petugas,(dalam hal ini tenaga *community worker*) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan nondirektif. Persiapan tugas ini, terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai

²²Ibid., Hal. 202

²³Alamsyah, Cepi Yusrun, *Praktik Pekerja Sosial Generalis Suatu Tuntutan Intervensi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015. Hal. 173

²⁴ Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali, Hal. 244

pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat.

b) Persiapan lapangan. Pada tahap ini petugas (*community worker*) akan melakukan penyiapan dilapangan sekurang-kurangnya harus mengetahui gambaran umum masyarakat setempat, adat kebiasaan, kondisi sosio-demografisnya, dan yang lebih penting adalah mempersiapkan isu-isu yang mereka tangani bersama. Jika sudah mengetahui hal tersebut maka *community worker* harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dengan pihak terkait. Disamping itu, *community worker* juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal (*informal leader*), agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. pada tahap inilah terjadi kontak dan kontrak awal dengan kelompok sasaran.

2. Tahap assessment, proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang di ekspresikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk melakukan assessment dengan teknik SWOT seperti melihat kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threat*). Dalam proses ini, masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan tersebut keluar dari pandangan mereka sendiri dan

permasalahan yang disampaikan benar-benar terjadi dilingkungan sekitar.

3. Tahap perencanaan alternative program, pada tahap ini, pelaku perubahan (community worker) secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.
4. Tahap pemformulasian rencana aksi, pada tahap ini, pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program maupun kegiatan apa yang akan mereka lakukan, guna mengatasi permasalahan yang ada
5. Tahap pelaksanaan atau implementasi program, tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.
6. Tahap evaluasi, tahap evaluasi ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga dalam tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan

pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

7. Tahap terminasi, tahap ini merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi, karena proyek sudah harus dihentikan dikarenakan sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat meneruskan. Meskipun demikian, tidak jarang *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai: “Upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choice and life*); kesempatan (*chances*); definisi kebutuhan (*need definition*); gagasan (*ideas*); institusi (*institutions*); sumber-sumber daya (*resources*); aktivitas ekonomi (*economic activity*) dan reproduksi (*reproduction*) dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*); aksi politik dan sosial (*social and*

political action); serta pendidikan (*education*)”²⁵, Maka dalam pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu proses, metode, program, dan gerakan. Perbedaannya yaitu:

- a. Sebagai suatu “Proses”. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap-tahap berikutnya yang mencakup kemajuan dan perubahan dalam artian kriteria terspesifikasi.
- b. Sebagai suatu “Metode”. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dengan cara sedemikian rupa sehingga beberapa tujuan dapat dicapai. Penekanannya pada beberapa tujuan.
- c. Sebagai suatu “Program”. Metode pemberdayaan masyarakat dinyatakan sebagai suatu gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan. Sebagai suatu program, pemberdayaan masyarakat berhubungan dengan bidang-bidang subjek yang khas, seperti kesehatan, kesejahteraan, pertanian, industri dan rekreasi. Dengan demikian fokusnya ada pada kegiatan-kegiatan.
- d. Sebagai suatu “Gerakan”. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu perjuangan sehingga menjadi alasan yang membuat orang-orang mengabdikan. Sebagai suatu gerakan, pemberdayaan masyarakat

²⁵Ife, J. (2008). *Community development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* 3 edition. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. h. 66-67

juga cenderung melembaga dan membangun struktur organisasinya sendiri, menerima prosedur dan praktisi-praktisi professional.

2. Hambatan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat menguraikan sejumlah hambatan atau kendala yang harus dilalui oleh para pelaku perubahan dalam prakek pemberdayaan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari:²⁶

a. Hambatan internal komunitas yang berasal dari dalam komunitas sasaran terdiri dari:

1) Faktor predisposisi dari komunitas sasaran

Faktor ini muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Faktor predisposisi dapat berbentuk pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap dan persepsi dari komunitas sasaran.

2) Kebiasaan dari komunitas

Setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (otonomi fungsional). Pada satu sisi, kebiasaan dapat membantu *community worker* untuk mengembangkan rencana perubahan. Tapi di sisi lain, kebiasaan dapat menjadi faktor penghambat perubahan terutama kebiasaan yang sudah mengakar dan “dibenarkan” oleh masyarakat umum tersebut.

1) Ketergantungan komunitas sasaran terhadap orang lain

Ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi penghambat

²⁶Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Rajawali, Hal. 199-200

terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, maka proses ‘pemandirian’ masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.

2) Pengalaman keberhasilan terdahulu

Bila tindakan pertama yang dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, maka ia cenderung mengulangnya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama)

3) Pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu

Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk menghindari hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan meningkatkan ‘kecemasan dan ketakutan’ sehingga mereka menjadi pihak yang cenderung menolak pembaruan.

b. Hambatan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat yang harus dilalui oleh para pelaku perubahan dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang berasal dari hambatan internal komunitas atau dari luar komunitas sasaran terdiri dari:

1) Faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*)

Faktor penguat perubahan adalah sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud.

2) Norma sosial yang negative Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat terhadap perubahan yang ingin diwujudkan.

3) Kelompok kepentingan Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan dan memperluas asset yang mereka miliki tanpa memerhatikan kepentingan kelompok lainnya.

4) Nilai-nilai sakral di dalam komunitas Salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang dianggap ‘sakral’ dalam suatu komunitas.

5) Faktor pemungkin perubahan (*enabling factors*)

Faktor pemungkin perubahan adalah faktor yang mengikuti suatu perilaku dan menyediakan ‘imbalan’ yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Termasuk didalamnya adalah aspek keterjangkauan layanan atau ketersediaan pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru untuk melakukan perubahan.

c. Hambatan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat yang harus dilalui oleh para pelaku perubahan dalam prakek pemberdayaan

masyarakat yang berasal dari Hambatan yang bersumber dari eksternal komunitas sasaran terdiri dari:

1) Penolakan terhadap ‘orang luar’ *Community worker* biasanya merupakan orang yang berasal dari luar komunitas sehingga masyarakat dalam komunitas tersebut cenderung melakukan penolakan. Oleh sebab itu seorang *community worker* harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi orang luar dalam masyarakat tersebut.

2) Program lembaga eksternal komunitas yang tidak memberdayakan Banyaknya program yang tidak terkoordinasi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga eksternal, baik itu program dari LSM, pemerintah maupun dunia usaha tersebut tidak jarang justru membuat komunitas sasaran menjadi tergantung terhadap program-program tersebut.

3) Kebijakan dan peraturan perundangan yang tidak memberdayakan Peraturan perundangan dan kebijakan yang dibuat di level mikro tidak jarang menjadi kebijakan yang tidak memberdayakan, karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan sehingga kepentingan masyarakat menjadi relatif tersingkirkan ataupun tidak jarang hanya dijadikan pelengkap dalam rumusan peraturan perundangan dan kebijakan yang mereka buat.

D. Konsep Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran,

mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”.²⁷ Berikutnya, pengemis adalah “orang yang meminta-minta”. Kemudian, menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqbal 2005 gelandangan dan pengemis adalah kelompok yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan, mereka sudah terbiasa hidup dengan kemiskinan dan ketebatasan.

Gelandangan berasal dari kata gelandang dan mendapat akhiran “an”, yang selalu bergerak, tidak tetap dan berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada pada masyarakat gelandang tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil itu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial. Menjelaskan, Penyelenggaran kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan. Keluarga, kelompok, masyarakat. gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 281.

aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam lingkup ini gelandangan dan pengemis jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga masalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.²⁸

Maka terdapat secara spesifik, karakteristik gelandangan dan pengemis dapat dibagi:

a. Karakteristik Gelandangan

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya dikota-kota besar.
- 2) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial.

b. Karakteristik Pengemis

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.

Faktor - Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala - gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma- norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.²⁹

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan. ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu;

²⁹Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

b. Malas Berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis di bidang kerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

d. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka

seringkali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Tradisi yang turun temurun

Menggelandang dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu.

f. Mengemis dari pada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.

g. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berfikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

h. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

i. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru bagi gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis.

j. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tua nya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

k. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya merekapun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang dan bertahan hidup di kota.

Oleh sebab itu dalam kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-

sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa benar adanya beberapa faktor terjadinya gelandangan dan pengemis disebabkan sikap masyarakat sekitar gelandangan yang kurang peduli. Serta tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor kemiskinan adalah faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya gelandangan dan pengemis. Sedangkan konsep untuk anak jalanan sendiri adalah anak yang menghabiskan waktunya untuk melakukan aktifitas atau kegiatan dalam kesehariannya berada di jalanan yang digunakan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan ditempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun dalam melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan dengan penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus serta mobilitasnya tinggi.

E. Program Desaku Menanti

Definisi gelandangan itu sendiri adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁰ Demi mengentaskan angka gelandangan dan pengemis yang jumlahnya mencapai belasan ribu di Indonesia, pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mencanangkan sebuah program yang bernama *DESAKU MENANTI* sebagai salah satu bentuk penanganan masalah gelandangan dan pengemis tersebut.³¹

Program Desaku Menanti adalah sebuah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara terpadu, berbasis desa. Program pengentasan kemiskinan yang digagas Pemkot Malang bersama Kementerian Sosial (Kemensos) itu memang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berkategori kurang mampu (miskin). Namun, mampu memberikan peluang menjanjikan sebagai bekal untuk menyambung hidup bersama keluarga masing-masing. Untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan di kota berpenduduk sekitar satu juta jiwa itu, Pemkot Malang harus menyiapkan lahan cukup luas untuk membuka kawasan baru yang mampu menampung puluhan kepala keluarga (KK). Kawasan baru yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan itu berlokasi di daerah pelosok di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, dan diberi nama "Desaku Menanti". Penghuni Desaku Menanti itupun bukan warga masyarakat miskin pada umumnya, namun ada kekhususan yang mungkin di daerah lainnya belum ada, yakni warga eks-gelandangan dan pengemis yang selama ini berpeparsi di wilayah Kota Malang selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat tinggal.

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980

³¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2014

Memang, tidak banyak warga eks gelandangan dan pengemis yang mendapatkan kesempatan emas bisa terentaskan dari "profesinya" itu, hanya 40 KK. Sebelum menempati rumah barunya mereka juga dibekali dengan berbagai keterampilan, seperti perbengkelan dan kreativitas untuk mengolah beragam produk agar memiliki nilai ekonomi tinggi untuk bekal hidup mandiri dan meninggalkan jalanan.

Maka bentuk rehabilitasi sosial yang ditawarkan di dalam program ini berbeda dengan bentuk rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis pada tahun-tahun sebelumnya yang belum mampu menjawab pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan juga spiritual. Oleh karena itu, pembaharuan dari program Desaku Menanti ini ditujukan kepada keluarga gelandangan dan pengemis dimana akan diberikan keterampilan-keterampilan khusus. Selain digembleng berbagai keterampilan, warga eks-gelandangan dan pengemis yang ditampung di kawasan Desaku Menanti itu juga diberikan bekal religi sebagai bekal mental spiritualnya.

Serta keterampilan membuat berbagai produk makanan (camilan) maupun pembuatan kerajinan dari bahan-bahan sederhana juga sudah menghasilkan, meski masih dipasarkan di sekitar lokasi Desaku Menanti dengan konsumen warga sekitar. Yang menjadi kendala pemasaran produk-produk mereka adalah akses kendaraan karena lokasi Desaku Menanti berada di pinggiran Kota Malang yang jauh hiruk pikuk kota dan tidak ada angkutan umum yang melintasi kawasan itu. Bahkan, untuk mencapai lokasi Desaku Menanti harus melewati "hutan" dan perkebunan tebu, meski lahannya tidak terlalu luas. Oleh karena itu, Kemensos melalui

program Desaku Menanti juga memberikan fasilitas rumah sangat sederhana serta berbagai keterampilan untuk menopang kebutuhan hidupnya setelah tidak lagi hidup di jalanan.³²



³²<https://www.kemosos.go.id/artikel/wisata-kampung-topeng-program-desaku-menanti-kota-malang>